

# Pembuatan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus: Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun)

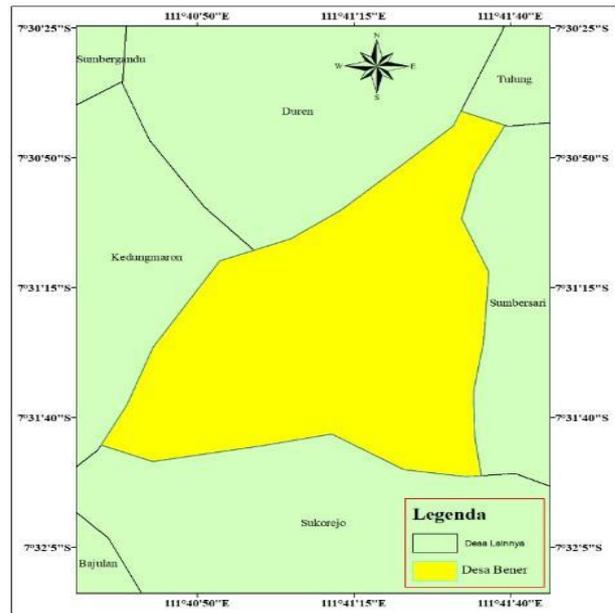
Savira Salsabila Firdaus, Yanto Budisusanto dan Ufiana Wahyu Deviantari  
 Departemen Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  
*e-mail:* yanto\_b@geodesy.its.ac.id

**Abstrak**—Desa Bener yang berada di Kabupaten Madiun masih belum terdata lengkap jumlah lahannya. Sedangkan secara kualitas, diyakini banyak terjadi perbaikan dan perluasan lahan sawah dan bangunan di Desa Bener [1]. Peningkatan jumlah lahan yang digunakan dapat berpengaruh terhadap perolehan PBB yang diterima. Sehingga dibutuhkan daya tampung dalam menghimpun basisdata PBB sistematis agar dapat digunakan dalam penyelenggaraan komputerisasi yang efektif. Penelitian ini dilakukan dalam rangka membuat suatu basisdata piutang PBB yang dibangun menggunakan teknologi *PostgreSQL*. Basisdata yang terbentuk kemudian dilakukan uji transaksi dengan *query*. Untuk memvalidasi hasil uji tersebut dilakukan perbandingan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan—telah berhasil membuat basisdata pengelolaan piutang PBB yang memuat informasi bahwa terdapat total tagihan dari 690 bidang dengan status tagihannya belum membayar sebesar Rp29.044.951,00 dan 670 bidang dengan status tagihannya sudah membayar sebesar Rp30.117.166,00. Berdasarkan status kategori piutang PBB [2], terdapat status kategori ‘subjek pajak tidak jelas’ yang terletak pada 223 bidang; status kategori ‘objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya’ terdapat pada 181 bidang dengan total tagihan sebesar Rp5.896.020,00; status kategori ‘objek dan subjek pajak jelas’ terdapat pada 1236 bidang dengan total tagihan sebesar Rp55.755.961,00. Basisdata yang tervalidasi dapat dijadikan pendukung identifikasi prioritas penarikan PBB.

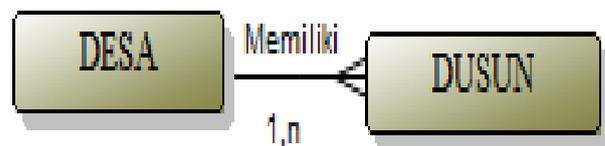
**Kata Kunci**—Basis Data, Tagihan Piutang PBB, Query

## I. PENDAHULUAN

KABUPATEN Madiun merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Madiun merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki kepadatan dengan proporsi 673 penduduk per hektar. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Madiun yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah Desa Bener, Kecamatan Saradan yakni sebesar 1.376 jiwa per km<sup>2</sup>. [3]. Kepadatan penduduk di Desa Bener, Kecamatan Saradan dapat berpengaruh secara langsung terhadap penambahan jumlah pemukiman baru. Selain itu, Desa Bener juga mengalami peningkatan lahan dengan fungsi persawahan, mengingat sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Lahan persawahan dan pemukiman baru di Desa Bener saat ini belum terdata secara lengkap jumlah lahannya. Sedangkan secara kualitas, diyakini banyak terjadi perbaikan dan perluasan lahan sawah dan bangunan di Desa Bener [1]. Pertambahan jumlah lahan baik pemukiman maupun persawahan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan meningkatnya



Gambar 1. Lokasi Penelitian

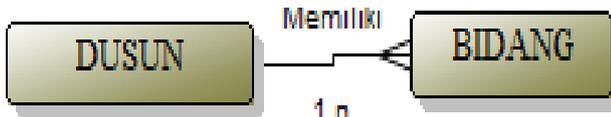


Gambar 2. Diagram ER Desa - Dusun

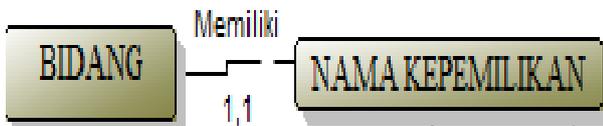
pengenaan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah masing-masing sebagai perwujudan desentralisasi. Jumlah PBB yang diterima merupakan bagian dari tulang punggung pembiayaan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah bekerjasama dengan desa/kelurahan untuk besinergi dalam hal pemungutan PBB di wilayah masing-masing. Seperti halnya di Desa Bener, Kantor Desa Bener melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penarikan PBB masih secara manual. Petugas desa masih harus mencocokkan data yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dengan peta bidang tanah analog yang berjumlah



Gambar 3. Diagram ER Dusun – Bidang



Gambar 4. Diagram ER Bidang – Nama Kepemilikan



Gambar 5. Diagram ER Nama Kepemilikan – Pembayaran

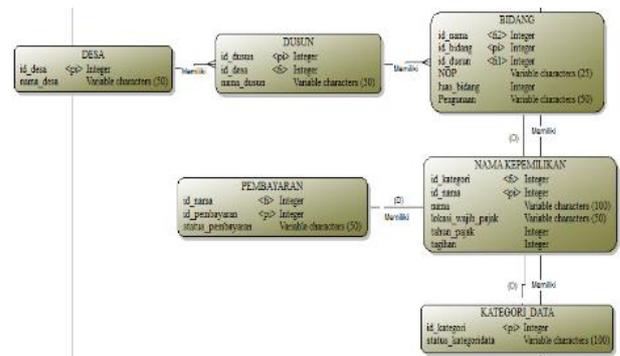
sangat banyak. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dan tenaga lebih dalam menyelesaikannya atau dengan kata lain lebih tidak efisien. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan penyusunan basis data terkait informasi PBB di Desa Bener guna memberikan kemudahan dalam rangka penarikan PBB dan lebih meningkatkan efektivitas.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Desa Bener termasuk dalam wilayah geografis Kabupaten Madiun yang merupakan bagian dari wilayah Madiun Utara. Secara geografis Desa Bener terletak pada 111°40’25” BT - 111°41’40” BT dan 7°30’40” LS - 7°31’52.5” LS dengan luas wilayah ± 231 Ha. Batas wilayah Desa Bener, Kecamatan Saradan adalah [3] dapat dilihat pada Gambar 1.

- Sebelah Utara : Desa Duren
- Sebelah Timur : Desa Sumbersari
- Sebelah Selatan : Desa Sukorejo
- Sebelah Barat : Desa Kedungmaron

Penelitian ini menggunakan data spasial dan data non-spasial. Data spasial yang digunakan berupa Peta Bidang Tanah Digital Desa Bener Tahun 2019 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun dan Peta Bidang Tanah Analog Desa Bener Tahun 2019 dari Kantor Desa Bener. Sedangkan untuk data non-spasial berupa Salinan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Desa Bener Tahun 2019.



Gambar 7. Model Logikal Basis Data

Tabel 1. Rancangan Model Fisikal

Table	Name	Data Type	Constrint	Key
Desa	id_desa	Integer	Not Null	PK
	nama_desa	Varchar (50)	Null	
	id_dusun	Integer	Not Null	PK
Dusun	id_desa	Integer	Not Null	FK
	nama_dusun	Varchar (50)	Null	
	nn			
	id_bidang	Integer	Not Null	PK
Bidang	id_dusun	Integer	Not Null	FK1
	id_nama	Integer	Not Null	FK2
	NOP	Varchar (25)	Null	
	luas_bidang	Integer	Null	
	Pengunaan	Varchar (50)	Null	
	id_kategori	Integer	Not Null	FK
Nama Kepemilikan	id_nama	Integer	Not Null	PK
	nama	Varchar (100)	Null	
	lokasi_wajin	Varchar (50)	Null	
	b_pajak			
	tahun_pajak	Integer	Null	
Pembayaran	tagihan	Integer	Null	
	id_nama	Integer	Not Null	FK
	id_pembayaran	Integer	Not Null	PK
	status_pembayaran	Varchar (50)	Null	
Kategori Data	id_kategori	Integer	Not Null	PK
	status_kategori_data	Varchar (100)	Null	

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial dan *PostgreSQL* melalui perancangan model basis data. Dalam penelitian ini dibuatlah 1 basis data dengan nama PBB dan terdiri atas 6 entitas. Entitas tersebut diantaranya adalah desa, dusun, bidang, nama kepemilikan, pembayaran dan status kategori data. Perancangan basis data dibuat guna mendapatkan model basis data yang terstruktur dan saling terintegrasi satu sama lain. Pada perancangan basis data dihasilkan 3 rancangan yaitu:

A. Rancangan Model Konseptual Basis Data

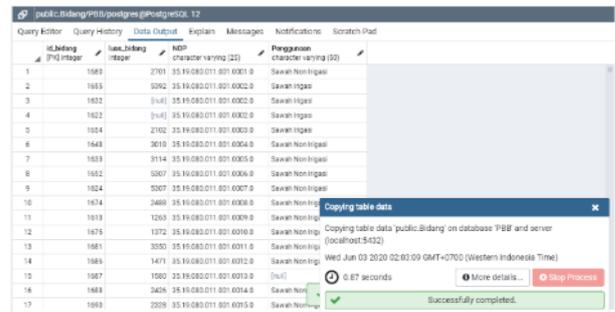
Dalam model ini melakukan identifikasi objek-objek yang terlibat beserta atribut-atribut dan hubungan antar objek. Model konseptual pada penelitian ini ditunjukkan menggunakan diagram *Entity Relationship (ER)*.

1) Kerangka dan hubungan antara entitas Desa dengan Dusun.

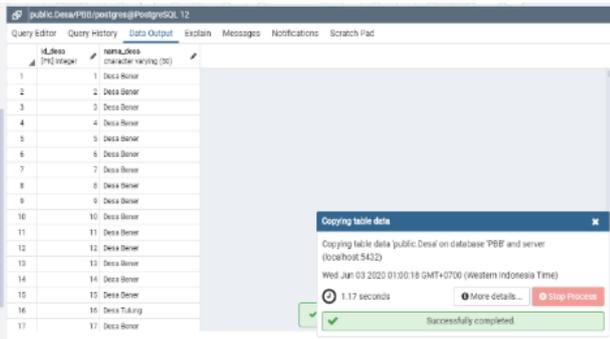
Kerangka tabel : Desa (ID desa, Nama desa), Dusun (ID dusun, Nama dusun). Setiap desa memiliki beberapa dusun



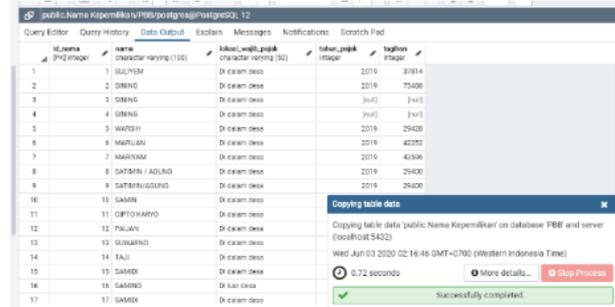
Gambar 8. Hasil Pembuatan Tabel Entitas



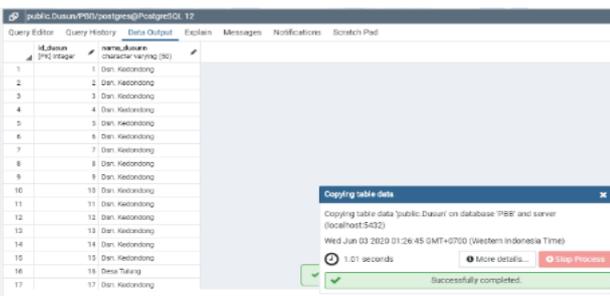
Gambar 11. Hasil Penambahan Data pada Tabel Bidang



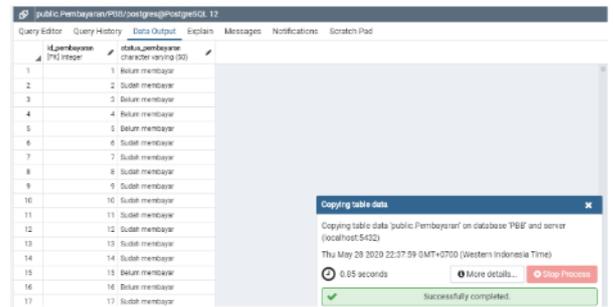
Gambar 9. Hasil Penambahan Data pada Tabel Desa



Gambar 12. Hasil Penambahan Data pada Tabel Nama Kepemilikan



Gambar 10. Hasil Penambahan Data pada Tabel



Gambar 13. Hasil Penambahan Data pada Tabel Pembayaran

dan setiap dusun hanya berada pada satu desa, sehingga direpresentasikan dengan derajat hubungan 1 : n (satu dibanding banyak), dengan tingkat partisipasi total pada kedua entitas dapat dilihat pada Gambar 2.

2) Kerangka dan hubungan antara entitas Dusun dengan Bidang.

Kerangka tabel : Bidang (ID bidang, NOP, Luas. Bidang, Penggunaan). Setiap setiap dusun memiliki beberapa bidang tanah dan bidang tanah hanya berada pada satu dusun, sehingga direpresentasikan dengan derajat hubungan 1 : n (satu dibanding banyak), dengan tingkat partisipasi total pada kedua entitas, dapat dilihat pada Gambar 3.

3) Kerangka dan hubungan antara entitas Bidang dengan Nama Kepemilikan.

Kerangka tabel : Nama Kepemilikan (Nama, Alamat, Total pajak, Tahun Pajak, Tagihan). Setiap bidang tanah hanya memiliki satu nama kepemilikan dan setiap nama dapat dilihat pada Gambar 4.

4) Kerangka dan hubungan antara entitas Nama Kepemilikan dengan Pembayaran.

Kerangka tabel : Pembayaran (ID pembayaran, Status Pembayaran). Setiap nama kepemilikan hanya memiliki satu pembayaran, sehingga direpresentasikan dengan derajat hubungan 1 : 1 (satu dibanding satu), dapat dilihat pada Gambar 5.

5) Kerangka dan hubungan antara entitas Nama Kepemilikan dengan Kategori data.

Kerangka tabel : Kategori Data (ID kategori, Status Kategori). Setiap nama kepemilikan hanya memiliki satu status kategori data, sehingga direpresentasikan dengan derajat hubungan 1 : 1 (satu dibanding satu) dapat dilihat pada Gambar 6.

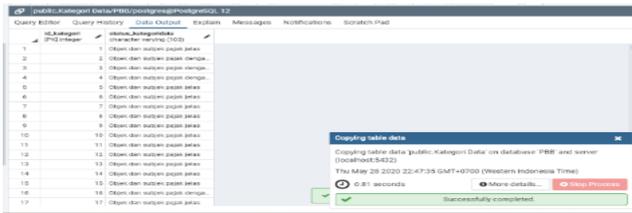
B. Rancangan Model Logikal Basis Data

Pada tahapan ini, dapat dilihat pada Gambar 7 jenis SMDB yang dipilih adalah model objek relasional. Kelas beserta atribut – atribut yang telah ditentukan pada model konseptual kemudian diwujudkan ke dalam tabel yang saling berhubungan. Selain itu juga ditentukan elemen kunci baik identitas utama (*primary key*) maupun identitas tamu (*foreign key*) dari tiap-tiap tabel.

C. Rancangan Model Fisikal Basis Data

Perancangan model fisikal dimaksudkan untuk membuat spesifikasi struktur penyimpanan tabel. Berikut merupakan spesifikasi struktur dari masing-masing berkas data dengan *Primary Key* (PK) dari tiap tabel adalah id\_desa untuk tabel desa, id\_dusun untuk tabel dusun, id\_bidang untuk tabel bidang, id\_nama untuk tabel nama kepemilikan, id\_pembayaran untuk tabel pembayaran, id\_status untuk tabel status kategori data, dapat dilihat pada Tabel 1.

Setelah model rancangan berhasil dibuat langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi sistem basis



Gambar 14. Hasil Penambahan Data pada Tabel Kategori

Tabel 2. Kategori Data Piutang PBB

Kode Kategori Objek Pajak	Keterangan
1	Objek pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan.
2	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari satu kali pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda).
3	Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA, dll.
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas.



Gambar 15. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL

data. Hasil perancangan model logikal dan fisikak kemudian diimplementasikan ke dalam perangkat lunak SDBD yang dipilih (*PostgreSQL*). Kemudian melakukan uji transaksi basis data untuk memvalidasi data dengan perangkat lunak SIG.

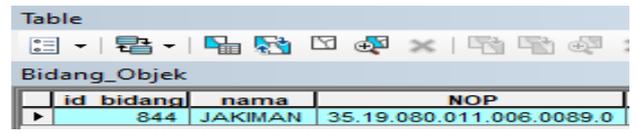
### III. PETUNJUK TAMBAHAN

#### A. Implementasi Basis Data

Tahap pertama dalam melakukan implementasi basis data yaitu dengan membuat tabel untuk masing-masing entitas di perangkat lunak SDBD dengan menggunakan *SQL* atau alternatif yang lain adalah *create* tabel. Berikut merupakan hasil dari pembuatan tabel entitas tersebut, dapat dilihat pada Gambar 8. Tabel entitas yang berhasil dibuat masih berupa tabel kosong tanpa data didalamnya. Sehingga perlu dilakukan proses penambahan data sesuai dengan data yang diperlukan dengan menggunakan *SQL* atau *import* data dengan *tools* yang sudah ada pada *PostgreSQL*, dapat dilihat pada Gambar 9 sampai Gambar 14.

#### B. Uji Transaksi Basis Data

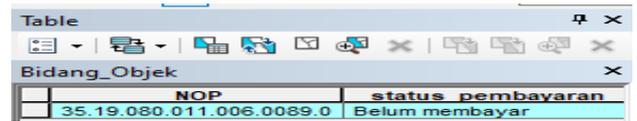
Uji transaksi basis data dilakukan menggunakan *PostgreSQL* dan perangkat lunak pengolah data spasial. Dalam penelitian ini telah melakukan klasifikasi kategori piutang data PBB berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 12/PJ/2012 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dalam Surat Edaran Jenderal Pajak ini terdapat pembagian jenis kategori data piutang. **Tabel 2.** Kategori Data Piutang PBB. Adapun macam-macam pertanyaan yang bisa digunakan dalam



Gambar 16. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial



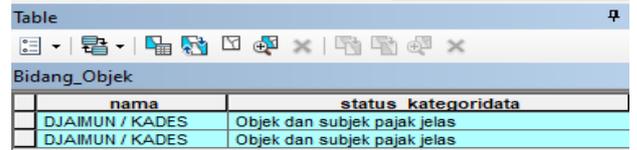
Gambar 17. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL



Gambar 18. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial



Gambar 19. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL



Gambar 20. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial

kegiatan pengelolaan informasi data piutang PBB sekaligus menjadi validasi untuk transaksi basis data PBB sebagai berikut:

1) *Siapa pemilik bidang dengan NOP 35.19.080.011.006.0089.0 ?*

Dari hasil validasi *query* menggunakan *PostgreSQL* dan *software* pengolah data spasial terlihat bahwa pemilik bidang dengan NOP 35.19.080.011.006.0089.0 adalah atas nama Bapak Jakiman.

2) *Apakah wajib pajak dengan NOP 35.19.080.011.006.0089.0 sudah membayar pajak ?*

Dari hasil validasi *query* menggunakan *PostgreSQL* dan *software* pengolah data spasial terlihat bahwa wajib pajak dengan NOP 35.19.080.011.006.0089.0 memiliki status belum membayar tagihan pajaknya untuk tahun 2019, dapat dilihat pada Gambar 17 dan 18.

3) *Bagaimana status kategori piutang PBB milik Bapak Djaimun/Kades ?*

Dari hasil validasi *query* menggunakan *PostgreSQL* dan *software* pengolah data spasial terlihat bahwa status kategori piutang PBB milik Bapak Djaimun tergolong pada kategori data objek dan subjek pajak yang jelas dapat dilihat pada Gambar 19 dan 20.

4) *Siapa batas utara dari sebidang tanah milik Budi Wasito?*

Dari hasil validasi *query* menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial dengan *selection by attribute* terlihat bahwa batas utara dari sebidang tanah milik Budi Wasito adalah sebidang tanah milik Silah yang ditandai dengan tanda warna kuning., dapat dilihat pada Gambar 21.

Gambar 21. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial

Gambar 25. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial

```

Query Editor Query History Explain Messages Notifications Scratch Pad
1 select public."Nama Kepemilikan"."nama", public."Nama Kepemilikan"."tagihan", public."Pembayaran"."status_pembayaran",
2 public."Kategori"."status_kategoridata"
3
4 from public."Kategori" inner join public."Pembayaran" using ("id_bidang") using ("id_bidang")
5 where public."Nama Kepemilikan"."tagihan" = '20956' and public."Pembayaran"."status_pembayaran" = 'Sudah membayar'
6 and public."Kategori"."status_kategoridata" = 'Objek dan subjek pajak jelas'
    
```

Gambar 22. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL

```

Query Editor Query History Explain Messages Notifications Scratch Pad
1 select public."Nama Kepemilikan"."nama", public."Bidang"."nama", public."Bidang"."luas_bidang",
2 public."Desa"."nama_desa" as lokasi, public."Nama Kepemilikan"."tagihan", public."Pembayaran"."status_pembayaran",
3 public."Kategori"."status_kategoridata"
4
5 from public."Desa" inner join public."Bidang" inner join public."Pembayaran" inner join public."Kategori"
6 where public."Nama Kepemilikan"."tagihan" = '20956'
7 and public."Pembayaran"."status_pembayaran" = 'Sudah membayar'
8 inner join public."Nama Kepemilikan" using ("id_bidang") using ("id_bidang") using ("id_bidang") using ("id_bidang")
9 and public."Desa"."nama_desa" = 'Dsn. Setono'
10 and public."Bidang"."luas_bidang" >= 1000
    
```

Gambar 26. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL

nama	tagihan	status pembayaran	status kategoridata
SRI WULANDARI	321056	Sudah membayar	Objek dan subjek pajak jelas
BAYAN SUKIDI	459744	Sudah membayar	Objek dan subjek pajak jelas
BK BAYAN/RASID	301212	Sudah membayar	Objek dan subjek pajak jelas
TANAH KAS DESA BENER	298998	Sudah membayar	Objek dan subjek pajak jelas

Gambar 23. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial

nama	NOP	luas	nama dusun	tagihan	status pembayara	status kategoridata
BUDIONO	35.19.080.011.013.0016.0	2035	Dsn. Setono	97680	Sudah membayar	Objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya
SADYEM	35.19.080.011.011.0067.0	2095	Dsn. Setono	86665	Sudah membayar	Objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya
PARNO	35.19.080.011.004.0123.0	1694	Dsn. Setono	45738	Sudah membayar	Objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya

Gambar 27. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial

```

Query Editor Query History Explain Messages Notifications Scratch Pad
1 select min(public."Nama Kepemilikan"."tagihan") as Tagihan_terkecil,
2 max(public."Nama Kepemilikan"."tagihan") as Tagihan_terbesar
3 from public."Nama Kepemilikan"
4 where public."Nama Kepemilikan"."lokasi_wajib_pajak" is not null
5 and "Nama Kepemilikan"."lokasi_wajib_pajak" = 'di dalam desa'
    
```

Gambar 24. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL

```

Query Editor Query History Explain Messages Notifications Scratch Pad
1 select min(public."Nama Kepemilikan"."tagihan") as Tagihan_terkecil,
2 max(public."Nama Kepemilikan"."tagihan") as Tagihan_terbesar
3 from public."Nama Kepemilikan"
4 where public."Nama Kepemilikan"."lokasi_wajib_pajak" is not null
5 and "Nama Kepemilikan"."lokasi_wajib_pajak" = 'di dalam desa'
    
```

Gambar 28. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL

5) Bidang tanah dengan objek dan subjek jelas milik siapa sajakah yang memiliki tagihan sudah terbayar lebih dari Rp294.001,00?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah data spasial terlihat bahwa terdapat 4 bidang tanah dengan objek dan subjek pajak jelas yang memiliki tagihan sudah terbayar lebih dari Rp294.001,00 yaitu milik tanah milik desa, Bk Bayan/Rasid, Sri Wulandari dan Bayan Sukidi, dapat dilihat pada Gambar 22 dan 23.

6) Berapa bidang tanah di Desa Bener yang memiliki tagihan lebih dari Rp12.500,00 namun kurang dari Rp13.000,00 dan memiliki status belum dibayar?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah data spasial terlihat bahwa terdapat 10 bidang tanah di Desa Bener yang memiliki tagihan lebih dari Rp12.500,00 namun kurang dari Rp13.000,00 dan memiliki status belum dibayar dapat dilihat pada Gambar 24 dan 25.

7) Berapa jumlah bidang tanah dengan status objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya di Dsn. Setono yang memiliki tagihan sudah terbayar kurang dari Rp200.000,00 dengan luas bidang tanahnya lebih dari 100?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah data spasial terlihat bahwa terdapat bidang tanah dengan status objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya di Dsn. Setono yang memiliki tagihan sudah terbayar kurang dari Rp200.000,00 dengan luas bidang tanahnya lebih dari 100 adalah sebanyak 4 bidang tanah dapat dilihat pada Gambar 26 dan 27.

8) Berapa besar tagihan terkecil dan tagihan terbesar di Desa Bener?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat bahwa tagihan terkecil sebesar Rp12.500,00 dan

tagihan terbesar sebesar Rp881.172,00 dapat dilihat pada Gambar 28.

9) Berapa jumlah total tagihan baik di dalam lokasi Desa Bener maupun di luar lokasi Desa Bener?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat bahwa jumlah total tagihan di dalam lokasi Desa Bener sebesar Rp59.162.117,00; untuk total tagihan di luar lokasi Desa Bener sebesar Rp2.435.072,00 dapat dilihat pada Gambar 29.

10) Berapakah total tagihan di Desa Bener yang belum membayar dan sudah membayar?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat bahwa total tagihan dari 690 bidang tanah dengan status tagihannya belum membayar sebesar Rp29.044.951,00 dan 670 bidang tanah dengan status tagihannya sudah membayar sebesar Rp30.117.166,00 dapat dilihat pada Gambar 30.

11) Berapa seluruh total tagihan berdasarkan status kategori data piutang PBB?

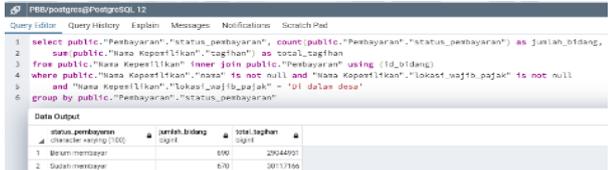
Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat bahwa status kategori 'subjek pajak tidak jelas' terdapat pada 223 bidang tanah; status kategori 'Objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya' terdapat pada 181 bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp5.896.020,00; status kategori 'Objek dan subjek pajak jelas' terdapat pada 1236 bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp55.755.961,00 dapat dilihat pada Gambar 31.

12) Berapa seluruh total tagihan berdasarkan jenis penggunaan dari masing-masing bidang tanah?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat bahwa terdapat 408 bidang tanah yang digunakan sebagai pemukiman dengan total tagihan sebesar



Gambar 29. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL



Gambar 30. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL



Gambar 31. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL



Gambar 32. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL

Rp9.273.136,00; 337 bidang tanah sebagai sawah non irigasi dengan total tagihan sebesar Rp22.633.111,00; 75 bidang tanah sebagai tegalan/ladang dengan total tagihan sebesar Rp2.329.758,00; 57 bidang untuk sawah irigasi dengan total tagihan sebesar Rp2.778.326,00; 1 bidang sebagai tanah kosong dengan total tagihan sebesar Rp21.740,00 dapat dilihat pada Gambar 32.

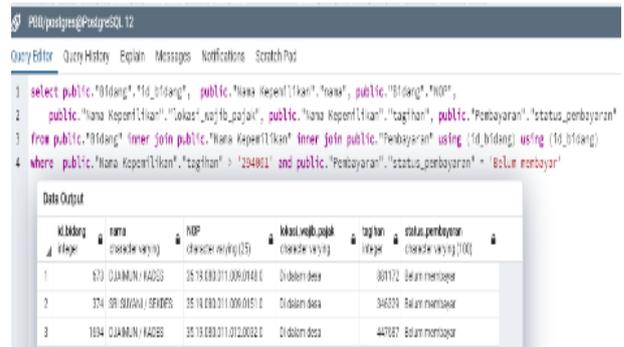
13) Bidang tanah milik siapa sajakah yang dapat dijadikan sebagai prioritas penarikan PBB di Desa Bener (memiliki tagihan yang tergolong sedang dan tinggi dengan status belum melakukan pembayaran)?

Dari hasil validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah data spasial terlihat bahwa terdapat 3 bidang tanah yang dapat dijadikan sebagai prioritas penarikan PBB di Desa Bener (memiliki tagihan yang tergolong sedang dan tinggi dengan status belum melakukan pembayaran) yaitu bidang tanah milik Bapak Djaimun dan Ibu Sri Suyani dengan besar tagihan masing-masing Rp881.172,00; Rp447.687,00 dan Rp346.329,00 dapat dilihat pada Gambar 33 dan 34.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dihasilkan suatu model basis data untuk menghimpun data piutang PBB di Desa Bener, Kecamatan Saradan. Dari penelitian ini dapat memperoleh informasi bahwa terdapat total tagihan dari 690 bidang tanah dengan status tagihannya belum membayar



Gambar 33. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL

id bidang	nama	NIP	lokasi wajib pajak	tagihan	status pembayaran
374	SRI SUYANI/SEKEDS	35.19.080.011.009.0151.0	Di dalam desa	346329	Belum membayar
670	DIJAIMUN/KADES	35.19.080.011.009.0140.0	Di dalam desa	881172	Belum membayar
1694	DIJAIMUN/KADES	35.19.080.011.012.0032.0	Di dalam desa	447687	Belum membayar

Gambar 34. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial

yaitu sebesar Rp29.044.951,00 dan 670 bidang tanah dengan status tagihannya sudah membayar yaitu sebesar Rp30.117.166,00. Berdasarkan status kategori piutang PBB, terdapat status kategori 'subjek pajak tidak jelas' yang terletak pada 223 bidang tanah; status kategori 'objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya' terdapat pada 181 bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp5.896.020,00; status kategori 'objek dan subjek pajak jelas' terdapat pada 1236 bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp55.755.961,00.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan data PBB dengan tahun pengenaan yang lebih bervariasi guna menghimpun data yang lebih banyak dan agar dapat mengetahui perbedaan jumlah pajak bagi tiap wajib pajak dari tiap tahunnya serta perlunya melakukan pengecekan berkala di lapangan agar dapat memberikan klasifikasi kategori data yang sesuai dengan keadaan terkini pada saat dilakukan penelitian.

LAMPIRAN

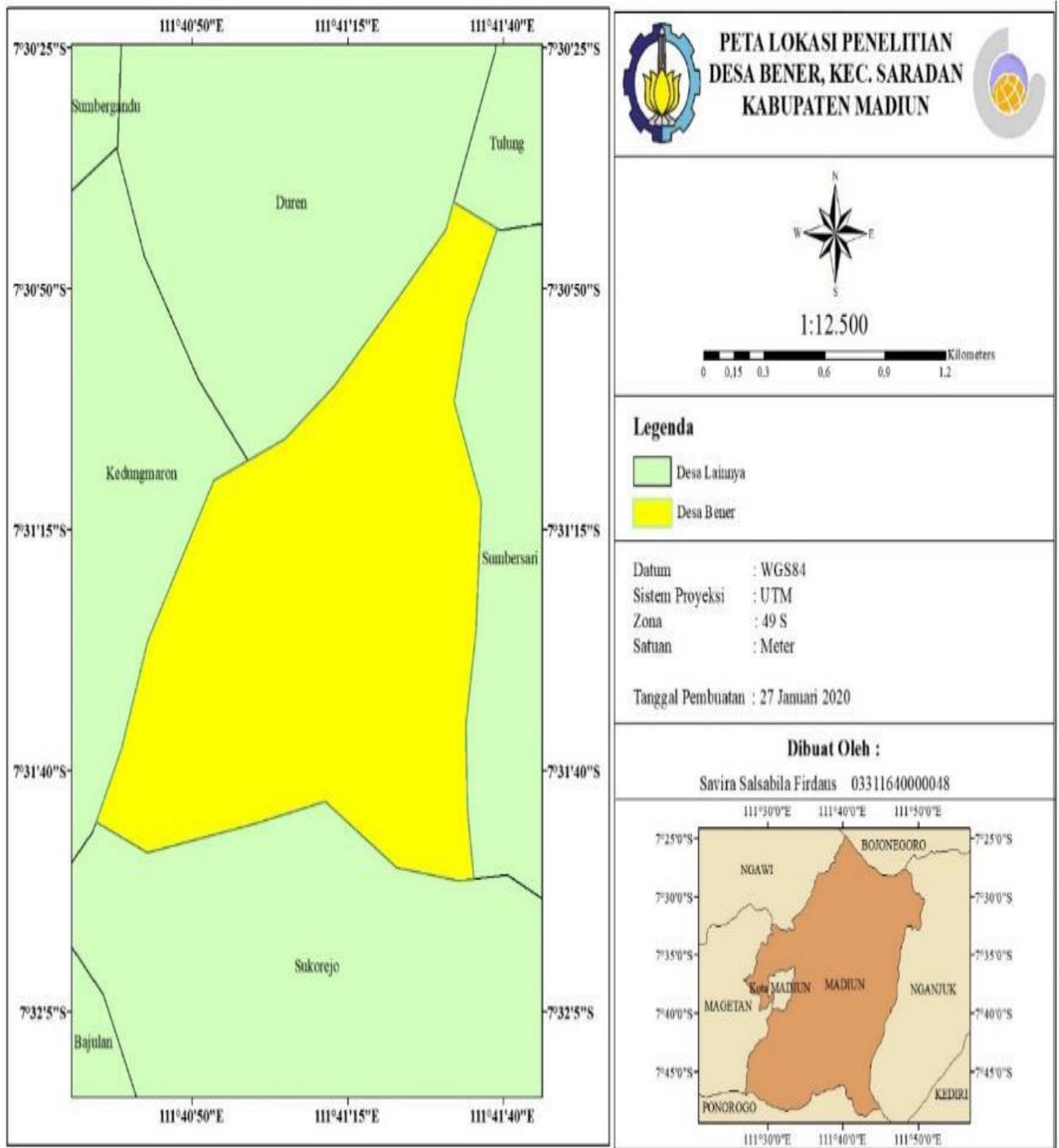
Peta lokasi penelitian dengan judul Pembuatan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus: Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun) dapat dilihat pada Gambar 35.

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Ma'aruf, "Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-2)," 2015.

[2] D. Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-12/PJ/2012 -. Jakarta, 2012.

[3] Badan Pusat Statistik Kota Madiun, "Kecamatan Saradan dalam Angka," Madiun, 2018.



Gambar 35. Peta Lokasi Penelitian Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.